

**EFEKTIVITAS PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN
DAERAH MELALUI PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Olepa Wenda

NPP. 32.1072

Asdaf Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.1072@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The quality of regional financial reporting through the implementation of the Puncak Jaya Regency Regional Government Information System is not yet effective. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness of the quality of regional financial reporting through the implementation of the Puncak Jaya Regency Regional Government Information System. **Method:** The research method used by researchers in this study is a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the study obtained by researchers indicate that financial reporting through the Regional Government Information System is not yet fully effective in Puncak Jaya Regency, because of the eighteen indicators in this study, eight indicators are effective and ten indicators are not yet effective, which means that financial reporting through SIPD is not yet effective. **Conclusion:** Regional financial reporting through the Puncak Jaya Regency Regional Government Information System has not been running effectively, this is because there are still several obstacles that affect the quality of financial reporting, namely still constrained by network infrastructure, inadequate human resources, and obstacles in communication transmission. In order to improve the quality of financial reporting through the implementation of SIPD, it is recommended to provide quality network infrastructure, implement socialization to improve understanding, and improve the SIPD application.*

Keywords: *Report Quality, Financial Reports, Regional Government Information Systems*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Belum efektifnya peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan*

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa laporan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya efektif di Kabupaten Puncak Jaya, karena dari delapan belas indikator yang ada dalam penelitian ini, delapan indikator nya efektif dan sepuluh indikator belum efektif yang artinya laporan keuangan melalui SIPD belum efektif. **Kesimpulan:** Pelaporan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, yaitu masih terkendala infrastruktur jaringan, sumber daya manusia yang belum memadai, dan kendala dalam transmisi komunikasi. Guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan SIPD, disarankan untuk penyediaan infrastruktur jaringan yang berkualitas, pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, dan penyempurnaan aplikasi SIPD

Kata Kunci: Kualitas pelaporan, Laporan Keuangan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Disusun berdasarkan prinsip-prinsip dan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku secara umum (Sinurat, 2018).

Kualitas laporan keuangan dapat diukur berdasarkan tingkat baik atau buruknya laporan keuangan daerah, dengan taraf atau derajat tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, karakteristik kualitatif perlu dipenuhi laporan keuangan agar dapat dianggap sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Kegunaan dari laporan keuangan ialah akuntabilitas pemerintahan, dasar pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, evaluasi kinerja, memenuhi standar dan regulasi, pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan, laporan tersebut harus memiliki nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah (Defitri, 2018).

Transformasi digital dalam pemerintahan bukan hanya sebuah pilihan, tetapi suatu keharusan dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri 4.0 (Yanto et al., 2025). Pemerintah daerah memiliki sistem informasi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Pemerintah daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu mencerminkan seberapa jauh laporan keuangan menghasilkan informasi yang jujur dan adil tentang

penyajian posisi keuangan yang jadi dasar pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas harus menunjukkan manfaat dan efek yang lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan Kebijakan akuntansi merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah (Suwanda, 2022). Kualitas laporan keuangan yang tinggi akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (Badung, 2019).

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya meluncurkan aplikasi SIPD pada tahun 2021 yang mempermudah pelaporan keuangan daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penerapan SIPD memang sangat memudahkan setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan tata pemerintahan. SIPD juga memungkinkan pemerintah pusat untuk memonitor proses pembangunan di daerah, guna memastikan pemerataan pembangunan daerah. Namun, hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya, terutama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan penginputan data dengan SIPD dari yang sebelumnya pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk mencegah terhambatnya pelayanan laporan keuangan.

Penggunaan SIPD yang baru oleh BPKAD Kabupaten Puncak Jaya sudah dimulai sejak tahun 2021. Penerapan aplikasi SIPD masih belum sepenuhnya efektif, karena fitur-fitur yang tersedia kerap mengalami kendala dan sering terjadi error. Oleh karena itu, aplikasi SIPKD masih digunakan sebagai pendukung dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Akses internet di Kabupaten Puncak Jaya masih tergolong kurang baik, yang dapat menghambat penggunaan aplikasi SIPD untuk pelaporan keuangan, termasuk dalam aspek penerimaan, penyetoran, laporan pertanggungjawaban penerimaan, dan pengelolaan uang persediaan. Hal tersebut dapat menyebabkan terkendala dalam pencairan gaji untuk pegawai pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dan semua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan tepat waktu yang akan mengganggu pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengukur sejauh mana kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Puncak Jaya. Penggunaan SIPD oleh BPKAD Kabupaten Puncak Jaya sudah dimulai sejak tahun 2021. Namun, dalam penerapannya masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa faktor yang menghambat penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dari aplikasi SIPD yang belum efektif dalam penggunaan aplikasi ini, dimana masih ada kendala dalam sistemnya yang sering error, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pencairan gaji bagi pegawai yang dapat mengakibatkan proses laporan keuangan terhambat. Hambatan berikutnya, yakni jaringan yang berpengaruh dalam penggunaan SIPD yang mengakibatkan permasalahan dalam laporan keuangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan pelaporan keuangan melalui pemanfaatan SIPD. Penelitian Nalle berjudul Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang (Nalle, 2023), menemukan bahwa penggunaan SIPD untuk pengelolaan keuangan di Kabupaten Kupang masih belum efektif. Indikator dasar hukum dinyatakan efektif, tetapi enam indikator lainnya belum mencapai efektivitas. Penelitian Hardian berjudul Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Riau (Herdian, 2024), menemukan bahwa SIPD telah digunakan oleh BPKAD Provinsi Riau mulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah terutama terkait penggunaan anggaran yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat kelemahan yang masih dihadapi dalam penggunaan SIPD dan menyebabkan terkendalanya pengelolaan keuangan daerah terutama dalam tahapan penatausahaan dan pelaporan anggaran. Penelitian Dwidya Nitasya, Lilik Handajani, dan Widia Astuti berjudul Implementasi SIPD: Apakah Efektif dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD (Dwidya Nitasya et al., 2023), menemukan bahwa implementasi SIPD dalam mendukung pelaporan keuangan di RSUD X jika dilihat dari segi indikator ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan kondisi yang memfasilitasi masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya SIPD masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi kestabilan sistem maupun ketersediaan fitur yang dibutuhkan, kebutuhan pengguna. Penelitian Zulfikar Fikri Amri berjudul Implementasi SIPD dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan (Amri, 2022), menemukan bahwa keempat indikator implementasi teori Edward, dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Diketahui hanya pada sumber daya terjadi sedikit kendala, yaitu data-data pendukung belum tersedia data dan akurasi. Penelitian Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat berjudul Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Sinurat, 2018), menemukan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan. Namun, pada dimensi sumber daya, terutama terkait indikator fasilitas sistem informasi AkLap masih terbatas. Penelitian Grace T. Pontoh, Darwis, dan Darmawati berjudul Peningkatan Pelaporan Keuangan Daerah Melalui Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang Efektif (*Improved Regional Financial Reporting Through Effective Information Technology and Regional Financial Accounting Systems*) (Pontoh & Reza, 2024), menemukan bahwa kualitas informasi teknologi, kualitas sistem akuntansi keuangan daerah, dan lingkungan pengendalian internal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Dengan kata lain, penggunaan sistem informasi yang baik seperti SIPD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Penelitian Ermina Siregar, Iskandar Sam, dan Wiwik Tiswiyanti berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal terhadap Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi (*The Influence of the Implementation of Local Government Information Systems, Human Resources, and Internal Control on the Qualitative Characteristics of Jambi City Government Financial Reports*) (Siregar et al., 2025), menemukan bahwa implementasi SIPD,

kompetensi SDM, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah, terutama pada aspek relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Penelitian Nurmila Daud, Harun Blongkod, dan Nilawaty Yusuf berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (*The Effect of the Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on Regional Financial Management Accountability*) (Daud et al., 2025), menemukan bahwa SIPD dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD membantu meningkatkan efisiensi dan pengendalian transaksi keuangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni, peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Perbedaan berikutnya terletak pada pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni, menggunakan pendapat dari Delone dan Mclean (DeLone & McLean, 2003) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem dapat diukur melalui 6 indikator, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah.

1.5. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kabupaten Puncak Jaya.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yakni cara untuk menjelajahi dan memahami makna dari perilaku individu dan kelompok, serta untuk menggambarkan masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, serta hasil penelitian lebih berorientasi pada makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti sebagai metode utama karena dapat menggambarkan kondisi nyata yang terjadi saat penelitian berlangsung. Dan dari hasil yang diperoleh dapat terbentuk sebuah kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang ada yaitu tentang peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Puncak Jaya.

Peneliti mengumpulkan data secara triangulasi data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Simangunsong, 2017). Teknik-teknik ini merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diamati. Dengan demikian, data yang didapatkan bersifat valid (menggambarkan kebenaran), reliabel (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat

membantu memahami masalah yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022). peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Kepala Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Anggaran PPKD, Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi, Kepala Sub Bidang Keuangan, dan Operator BPKAD. Informan-informan diatas dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan yaitu BPKAD untuk mendapatkan informasi terkait peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Adapun analisisnya menggunakan teori efektivitas sistem oleh Delone dan Mclean (DeLone & McLean, 2003) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem dapat diukur melalui 6 indikator, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 di dua lokasi penelitian, yakni BPKAD Kabupaten Puncak Jaya selama 21 hari dari tanggal 6 sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis efektivitas peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah menggunakan teori efektivitas sistem menurut Delone dan Mclean (DeLone & McLean, 2003) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem dapat diukur melalui 6 indikator, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan keuntungan bersih. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Kualitas Sistem

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Puncak Jaya memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kemudahan dalam proses penyusunan laporan keuangan karena tersedianya format standar yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat pula dampak negatif, yaitu permasalahan pada beberapa fitur SIPD yang berasal dari sistem pusat, yang dapat memengaruhi kinerja sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi tersebut secara optimal.

Kualitas sistem memegang peranan penting karena secara langsung memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam implementasinya, sistem SIPD di Kabupaten Puncak Jaya sering mengalami kendala teknis, seperti error yang terjadi saat menyimpan atau menginput data APBD. Data yang telah diinput kerap gagal tersimpan, bahkan dapat hilang secara tiba-tiba, disertai dengan munculnya pesan error tanpa penjelasan teknis yang jelas. Kondisi ini menyebabkan sinkronisasi data antara perencanaan, keuangan, dan aset menjadi tidak stabil dan tidak konsisten. Meskipun secara konseptual sistem SIPD dinilai efektif, tantangan teknis tersebut masih perlu diselesaikan agar sistem dapat berfungsi secara optimal dan tidak menghambat pelaksanaannya di lapangan.

Penerapan SIPD di Kabupaten Puncak Jaya dinilai membantu dalam melakukan penyesuaian anggaran tanpa harus mengubah sistem secara keseluruhan. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun demikian, masih

terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait infrastruktur jaringan yang belum memadai. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara, SIPD dinilai memberikan dampak positif karena mampu mendukung penyesuaian anggaran daerah secara fleksibel dan sesuai kebutuhan, meskipun efektivitas penuh baru dapat tercapai apabila didukung dengan sistem jaringan yang stabil dan memadai.

Penerapan SIPD di Kabupaten Puncak Jaya telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan transparansi ini berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, yang pada akhirnya mendukung perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui SIPD, data keuangan dapat disajikan secara lebih akurat, real-time, dan terintegrasi, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dan mendorong efektivitas dalam pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

3.2. Kualitas Informasi

SIPD memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan data keuangan secara terstruktur guna meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan daerah. Penggunaan SIPD dilaksanakan dengan mengikuti jadwal dan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, penginputan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui SIPD dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk tahun anggaran yang akan datang. Selanjutnya, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Oktober, dan proses penginputan RKA serta penyusunan RAPBD dilakukan melalui SIPD. APBD yang telah disetujui kemudian ditetapkan sebagai peraturan daerah paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun anggaran berjalan, dan SIPD juga digunakan untuk menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kabupaten Puncak Jaya pada prinsipnya telah menyesuaikan diri dengan jadwal tersebut dalam proses penyusunan anggaran melalui SIPD. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang lebih tepat waktu dan efektif. Namun demikian, pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD masih mengalami keterbatasan, terutama pada aspek penatausahaan dan pelaporan keuangan. Saat ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Puncak Jaya masih menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai sistem pendukung, karena SIPD belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh proses pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa fitur dalam SIPD yang belum berjalan secara optimal, sehingga membuktikan bahwa penerapannya masih belum efektif secara keseluruhan. Kendati demikian, SIPD dinilai mampu mengurangi risiko duplikasi anggaran dan kesalahan manusia berkat proses otomatisasi yang dimilikinya. Hal ini memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, keberadaan fitur audit dan pelacakan transaksi dalam SIPD memperkuat sistem pengendalian internal yang pada gilirannya dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan tingkat keandalan sistem yang tinggi, SIPD mendukung pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akurat, dan tepat waktu, serta menjadi salah satu faktor penunjang tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.3. Kualitas Pelayanan

Kabupaten Puncak Jaya memiliki keterbatasan kekurangan dari sistem pelayanan, hal tersebut terjadi karena tidak semua pegawai dapat menggunakan SIPD. Kantor BPKAD Kabupaten Puncak Jaya dapat ditemukan kekurangan sumber daya manusianya yang kurang paham untuk mengelola SIPD. BPKAD Kabupaten Puncak Jaya belum mampu memberikan informasi yang akurat karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, respons sistem terhadap penggunaan SIPD kurang optimal, terutama terkait kestabilan waktu pemrosesan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan seharusnya sekitar 2 jam, namun karena respons aplikasi yang kurang baik, proses penyusunan anggaran sering memakan waktu hingga 3-4 jam. Hal ini menyebabkan keterlambatan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran.

Dengan pendekatan yang berfokus pada pengguna serta responsif terhadap kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya, penerapan SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga turut berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

3.4. Intensitas Penggunaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Suku Umari tentang pelayanan penerbitan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan bahwa Meskipun sudah menggunakan SIPD dan telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi para pengguna, masih ditemukan beberapa kesalahan dalam penginputan data. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fitur yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, jumlah akses harian di BPKAD tergolong rendah karena sering terjadinya error pada sistem serta jaringan yang kurang memadai. Berikut adalah tabel jumlah akses aplikasi SIPD per tahun di BPKAD Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 4.4

Jumlah Akses Aplikasi SIPD

Tahun	Jumlah akses di BPKAD
Tahun 2021	70% Pertahun
Tahun 2022	75% Pertahun
Tahun 2023	80% Pertahun

Sumber: BPKAD Kabupaten Puncak Jaya, 2025

Tabel di atas menunjukkan peningkatan jumlah akses aplikasi SIPD di Kabupaten Puncak Jaya sejak awal penerapannya hingga saat ini. BPKAD menggunakan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan anggaran, seperti penginputan dan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari masing-masing OPD, serta dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS dan RAPBD yang terintegrasi dalam sistem SIPD. Selain itu, BPKAD juga memantau realisasi anggaran dan kas daerah secara real-time serta mengelola transaksi keuangan daerah, seperti pencairan dana, pencatatan belanja, dan pendapatan daerah melalui SIPD. Namun, proses pengelolaan keuangan ini sering terhambat karena jumlah pengguna yang belum mampu memberikan pelayanan secara efektif.

Penggunaan aplikasi SIPD telah berjalan dengan baik sesuai dengan intensitas waktu, karena sangat diperlukan dalam laporan keuangan, terutama untuk melaksanakan pengecekan bertahap. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi karena seiring dengan perkembangan zaman. Masalah terletak pada SDM yang menggunakan aplikasi tersebut, yang masih belum sepenuhnya menguasai fitur, terutama disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam penggunaan teknologi.

3.5. Kepuasan Pengguna

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan bahwa tidak semua pegawai BPKAD dapat mengakses SIPD secara langsung, karena akses ke sistem ini dibatasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Di BPKAD Kabupaten Puncak Jaya, hanya lima orang yang memiliki akses penuh ke SIPD. Meskipun begitu, para pengguna yang memiliki akses merasa puas dengan pengelolaan yang mereka lakukan. Dari segi kualitas sistem maupun informasi, keduanya sangat berperan penting dalam membantu penyusunan pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya

3.6. Manfaat Bersih

SIPD memberikan manfaat signifikan, khususnya dalam penyediaan informasi keuangan daerah, serta mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Kabupaten Puncak Jaya. Akses informasi melalui SIPD tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan. Pada akhirnya, hal ini turut mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengukur efektivitas peningkatan pelaporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Puncak Jaya, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan daerah tersebut. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan secara efektif. Penerapan SIPD masih menghadapi beberapa hambatan yakni Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami

penggunaan teknologi dan aplikasi SIPD. Sementara itu, faktor penghambat eksternal berkaitan dengan sistem SIPD itu sendiri, di mana sering terjadi error pada fitur tertentu yang dapat menghambat proses pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menemukan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian Zulfikar Fikri Amri (2020) yang menemukan bahwa penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan telah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti, sama halnya dengan temuan penelitian oleh Nalle (2023) dan (Manoe, Koten, and Rozady, 2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi hambatan seperti kendala sumber daya manusia yang kurang memahami penggunaan aplikasi karena minimnya sosialisasi teknis tentang penggunaan SIPD dalam mendukung penerapan SIPD.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya melalui aplikasi SIPD saat ini masih terbatas karena untuk proses pelaporan keuangan BPKAD masih menggunakan sistem yang lain, sistem tersebut adalah SIPKD karena SIPD masih belum sepenuhnya mampu mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan termasuk penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah. Hal yang sama dengan temuan penelitian ini juga dikemukakan oleh penelitian Dwidya Nitasya, Lilik Handajani, dan Widia Astuti (2023) dan Tumija, Asep Hendra, dan Marja Sinurat (2023) yang menemukan bahwa penerapan SIPD terlalu sering mengalami error serta fitur yang terdapat didalamnya belum selengkap aplikasi yang digunakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD di Kabupaten Puncak Jaya memiliki peran penting dalam dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah, upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, layaknya temuan penelitian Grace T. Pontoh, Darwis, dan Darmawati (Pontoh & Reza, 2024), penelitian Ermina Siregar, Iskandar Sam, dan Wiwik Tiswiyanti (Siregar et al., 2025) dan penelitian Nurmila Daud, Harun Blongkod, dan Nilawaty Yusuf (Daud et al., 2025). Apabila kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD berjalan dengan efektif, maka akan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dasar pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, evaluasi kinerja, memenuhi standar dan regulasi, pengendalian intern. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan pada fitur SIPD untuk mendukung pelaporan keuangan secara efektif.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan bahwa secara garis besar peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kabupaten Puncak Jaya memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi. Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi dan aplikasi

SIPD. Sementara itu, faktor penghambat eksternal berkaitan dengan sistem SIPD itu sendiri, di mana sering terjadi error pada fitur tertentu yang dapat menghambat proses pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Jaya belum berjalan secara efektif karena dari delapan belas indikator dalam enam dimensi efektivitas sistem menurut (DeLone dan McLean, 2003), delapan indikator sudah efektif dan sebelas indikator belum efektif. Adapun indikator yang telah efektif yaitu kemudahan pengguna, fungsionalitas, manfaat kualitas informasi, integritas, akurasi informasi, ketepatan waktu, keandalan data, dan manfaat akses informasi. Sedangkan indikator yang belum efektif adalah fleksibilitas, kemudahan, kelengkapan, keandalan sistem, up to date software and hardware, responsiveness, kepuasan pengguna, empati, penggunaan nyata, jumlah akses pengguna, dan kompleksitas fitur. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini yakni permasalahan teknis operasional seperti error sistem, kurangnya sosialisasi berupa diklat, kurangnya tidak lanjut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, direkomendasikan untuk Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya menyediakan jaringan yang memadai yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah melalui SIPD dan Kemendagri melakukan perbaikan atas sistem yang sering eror yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam proses laporan keuangan, pemerintah daerah diharapkan melakukan pelatihan rutin bagi operator SIPD dan Bendahara SKPD untuk memahami fitur-fitur SIPD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Puncak Jaya beserta jajarannya serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Z. F. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Semarang Timur)* (Vol. 5, Issue (1)). <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2020/B.241.20.0001/B.241.20.001-15-File-Komplit-20220831063014.pdf>
- Badung, B. (2019). *Catatan Atas Laporan Keuangan*. 130–147. <https://ppid.badungkab.go.id/front/dokumen/download/300290952>
- Daud, N., Blongkod, H., & Yusuf, N. (2025). *The Effect of the Implementation of Local Government Information Systems (SIPD) and Human Resources on*

- Regional Financial Management Accountability*. 3(1), 51–59.
<https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.207>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64.
<https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.2376>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
<https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dwidya Nitasya, Lilik Handajani, & Widia Astuti. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah: Apakah Efektif Dalam Mendukung Pelaporan Keuangan OPD. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 2(1), 243–255.
<https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v2i1.2094>
- Herdian. (2024). Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Provinsi Riau. *Ayan*, 15(1), 37–48.
[http://repository.untar.ac.id/46663/1/Herdian 125232134 JA.pdf](http://repository.untar.ac.id/46663/1/Herdian%20125232134%20JA.pdf)
- Nalle, M. O. (2023). *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Di Kabupaten Kupang*. <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/101155>
- Pontoh, G. T., & Reza, M. (2024). *Improved Regional Financial Reporting Through Effective Information Technology and Regional Financial Accounting Systems*. 2806–2819.
<https://www.journal.esrgroups.org/jes/article/view/5673/4048>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, E., Sam, I., & Tiswiyanti, W. (2025). *The Influence of the Implementation of Local Government Information Systems , Human Resources , and Internal Control on the Qualitative Characteristics of Jambi City Government Financial Reports*. 4(2), 461–476.
<https://dx.doi.org/10.55927/ajma.v4i2.14054>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah UNtuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK*. Cendekia.
- Yanto, F., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Pengaruh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Kota Pangkal. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 977–985.
<https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8204>